

**KINERJA PEGAWAI UNIT KERJA LAYANAN (UKL) DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Skripsi

*Diajukan Kepada Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

AZRINA PUTRI

NIM. 15042107

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS
NEGERI PADANG**

2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Kinerja Pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam
Pelayanan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Azrina Putri

NIM/TM : 15042107/2015

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

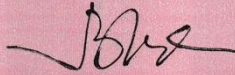
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Oktober 2019

Disetujui oleh,

Pembimbing



Adil Mubarak, S.IP, M.Si

197901082009121003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

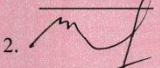
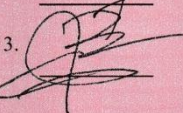
Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Selasa, 29 Oktober 2019 Jam 10.00 WIB-11.00 WIB

Kinerja Pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Azrina Putri
NIM/TM : 15042107/2015
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Oktober 2019

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Adil Mubarak, S.IP., M.Si.	1. 
Anggota	Drs. M.Fachri Adnan, M.Si., Ph.D.	2. 
Anggota	Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.P.d., M.Hum

NIP.19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azrina Putri
NIM/TM : 15042107/2015
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrai Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Kinerja Pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kealahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 29 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Azrina Putri

2015/15042107

ABSTRAK

**AZRINA PUTRI 12042107/2015 : Kinerja Pegawai Unit Kerja Layanan
(UKL) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan
Administrasi Kependudukan DiKabupaten
Pesisir Selatan.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ini di tentukan dengan teknik purpose sampling, diantaranya Kassubag, Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kasi. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Unit Kerja Layanan (UKL) kecamatan Bayang, kecamatan IV Jurai dan kecamatan Koto XI Tarusan, serta masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam praktiknya masih kurang baik, yaitu dalam aspek kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rancangan kerja, kepribadian, dan lingkungan kerja. Terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) tersebut.

Kata Kunci : kinerja pegawai, pelayanan, administrasi kependudukan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kinerja Pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang turut serta membantu penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr.Siti Fatimah,M.Pd.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, S.H.,M.Hum.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Adil Mubarak, S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D dan Bapak Aldri Frinaldi , SH, M.Hum, Ph.D selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Kedua Orang Tua tercinta, ayah dan mama yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang terbaik bagi penulis.
7. Ibuk Harmah Donna, selaku Kassubag. Umum dan Kepegawaian , bapak Anton Mahendra selaku Kasi. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan yang telah mengizinkan penelitian Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta membantu penulis dalam penelitian ini.
8. Bapak Zulkambri selaku Kepala Unit Kerja Layanan Kecamatan Bayang. .
9. Bapak Syafrul selaku Kepala Unit Kerja Layanan Kecamatan IV Jurai.
10. Ibuk Sri Yantini selaku Kepala Unit Kerja Layanan Kecamatan Koto XI Tarusan.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Yofita Sari, Rahmatia Gustin, Mainisya Pertiwi, Hasanatul Rahmi, Yelni Aprina dan Wulan Sari Fadilla yang telah banyak membantu dan mengisi banyak cerita dan kenangan dimasa-masa perkuliahan.
12. Sahabat-sahabat Crepesku Hasanatul Rahmi, Salminah Dira, Restina Rahmi, Saza Kurnia Utami, Kesy Tri Wahyuni, dan Surya Murdila Putri

yang telah memberikan dukungan dan semangat selama pembuatan skripsi ini.

13. Teristimewa untuk teman dihati Nando Fernando yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses skripsi ini.

14. Rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2015 dan keluarga besar Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang telah mengukir banyak cerita dan pengalaman selama masa perkuliahan ini.

Semoga petunjuk dan motivasi yang bapak, ibu, dan teman-teman berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, Oktober 2019

Penulis

Azrina Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Kajian Teoris.....	9
1. Kajian Tentang Kinerja Pegawai	9
2. Kajian Tentang Pelayanan Publik.....	18
3. Kajian Tentang Administrasi Kependudukan.....	20
4. Kajian Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Layanan	21
5. Kajian Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Disdukcapil	26
B. Kerangka Konseptual	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Informan Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Sampling	35
F. Uji Keabsahan Data.....	36
G. Teknis Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Temuan Umum Penelitian.....	38
B. Temuan Khusus Penelitian.....	52
C. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Konseptual	28
Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan	39
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Disdukcapil	45
Gambar 4.3 : Struktur Organisasi Unit Kerja Layanan.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Informan Penelitian	31
Tabel 4.1 : Jumlah Pegawai Unit Kerja Layanan.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara pasti mempunyai penduduk, begitu pula dengan negara Indonesia mempunyai penduduk yang mendiami wilayah Indonesia. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus.

Pada hakikatnya setiap Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Penduduk asli Indonesia dengan mempunyai bukti autentik yaitu Kartu Tanda Penduduk Indonesia. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Dalam pelaksanaan pendaftaran kependudukan dilaksanakan oleh instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, pelayanan yang baik dari aparaturnya pemerintahan sangatlah diperlukan. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik kepada masyarakat adalah salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bangsa Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar dari berbagai bidang termasuk di dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Undang-Undang 23 tahun 2014 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sesuai dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah mengemban tugas yang sangat besar dari seluruh aspek kinerja birokrasi pemerintahan pada umumnya, sehingga perlu adanya kontribusi yang nyata dari Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 yang sarat dengan isu strategis berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparaturnya pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan

bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang ini diidentifikasi diantaranya adalah menempatkan pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah otonom, yaitu Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan kata lain, pemerintahan kecamatan menempati posisi sebagai kepenjangan tangan pemerintah daerah otonom (desentralisasi), dan bukan sebagai aparat dekonsentrasi.

Pelayanan yang baik memiliki kaitan terhadap kinerja organisasi suatu perusahaan atau instansi dalam upaya mencapai tujuannya. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia kinerja seorang karyawan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang baik bagi karyawan itu sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan atau instansi tersebut. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama dan merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan.

Kinerja suatu birokrasi publik merupakan suatu isu yang sangat aktual yang terjadi pada masa sekarang ini. Masyarakat masih memandang kinerja dari birokrasi publik pada saat ini belum bisa memberikan rasa kepuasan yang tinggi, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas.

Hal tersebut disebabkan masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah.

Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu evaluasi kinerja merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka mempercepat dan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat/ penduduk merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan percepatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat/ penduduk. Untuk melaksanakan percepatan pelayanan maka perlu dilakukan perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan Pola Stelsel Aktif (layanan jemput bola) dimana dalam pelayanan administrasi kependudukan yang semula diwajibkan aktif adalah penduduk, diubah menjadi yang aktif adalah pemerintah melalui pola jemput bola atau pelayanan keliling.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat ini sudah melakukan kemudahan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat dengan dibentuk nya Unit Kerja Layanan (UKL) di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Unit Kerja Layanan (UKL) adalah Unit Kerja Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di setiap Kecamatan. Unit Kerja Layanan (UKL) ini mulai didirikan pada tahun 2017 dan baru berjalan pada tahun 2018. Pendirian Unit Kerja Layanan (UKL) ini sudah didasari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Sistem kerja dari Unit Kerja Layanan (UKL) ini pada prinsip nya sama dengan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten, apapun yang diterbitkan di Dinas diterbitkan juga di UKL Kecamatan. Pegawai pada setiap Unit Kerja Layanan (UKL) ini berjumlah sebanyak 5 orang yang terdiri dari, 1 Kepala, 2 Petugas Register, dan 2 Petugas Operator yang memiliki tugas dan fungsi nya masing-masing. Jadi, dari 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 90 Pegawai Unit Kerja Layanan (UKL). Pegawai Unit Kerja Layanan ini hanya berstatus sebagai Pegawai Honorer kecuali Kepala, tenaga honorer disini diambil dari pegawai UPTD Kecamatan, karena terjadinya kekosongan pekerjaan bagi staf-staf UPTD Kecamatan ini. Maka dari itu di instruksikan oleh Bupati Pesisir Selatan untuk mengambil beberapa staf UPTD untuk menjadi staf di Unit Kerja

Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain ada beberapa juga staf baru.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan juga Unit Kerja Layanan di Kecamatan dalam pelayanan sekarang sudah membuat beberapa inovasi baru dalam pelayanan yaitu, Layanan Salam Sapa ke Pintu Rumah, Layanan Berputar, Layanan Pas Nikah, dan Layanan Turut Berduka. Akan tetapi, seperti yang dilihat inovasi layanan ini belum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah diterapkan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ibu Maryati masyarakat kecamatan bayang yang mengurus akta kelahiran tentang bagaimana kinerja pegawai Unit Kerja Layanan :

“... Memang betul dengan adanya Unit Kerja Lapangan (UKL) di setiap kecamatan membuat masyarakat menjadi lebih mudah, terutama dalam hal transportasi. Masyarakat lebih hemat biaya dalam melakukan perjalanan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini. Namun masih ada kelemahan yang dirasakan yaitu seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang blangko nya sering tidak ada, dan informasi mengenai itu juga sering tidak pasti yang membuat masyarakat selalu berbolak-balik ke UKL tersebut. Dan satu hal lagi, pegawai UKL juga belum disiplin dalam segi waktu yaitu pada waktu jam istirahat yang kadang di percepat dari jam kerja yang telah diterapkan. Dan juga sarana dan prasarana juga belum terpenuhi seperti kursi untuk masyarakat menunggu masih kurang.”

Maka dari itu Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Kinerja Pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan”**

B. Identifikasi Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya kinerja pegawai honorer Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan administrasi kependudukan di Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kurangnya upaya peningkatan kinerja pegawai honorer Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti :

1. Kurangnya kinerja pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kurangnya upaya peningkatan kinerja pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah/Instansi terkait, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan evaluasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan terkait mata kuliah Administrasi Kependudukan.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi dari ilmu yang diperoleh peneliti selama menjalani kuliah pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang.